

**POLA PERSEBARAN DAN PEMANFAATAN KAWASAN
OLEH PELADANG DI HUTAN NAGARI BULUH KASOK
KECAMATAN LUBUK TAROK KABUPATEN SIJUNJUNG**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Sains (S.Si)**



**OLEH :
FINA HARIYANTI
NIM 19136137/2019**

**PROGRAM STUDI GEOGRAFI
DEPARTEMEN GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul : Pola Persebaran dan Pemanfaatan Kawasan oleh
Peladang di Hutan Nagari Buluh Kasok Kecamatan
Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung

Nama : Fina Hariyanti

NIM / TM : 19136137/2019

Program Studi : Geografi

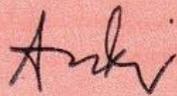
Departemen : Geografi

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Februari 2024

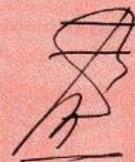
Disetujui Oleh

Kepala Departemen Geografi



Febriandi, S.Pd., M.Si.
NIP. 197102222002121001

Pembimbing



Dra. Endah Purwaningsih, M.Sc.
NIP. 196608221998022001

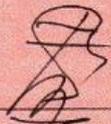
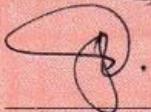
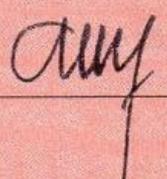
PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Nama : Fina Hariyanti
TM/NIM : 2019/19136137
Program Studi : SI Geografi NK
Departemen : Geografi
Fakultas : Ilmu Sosial

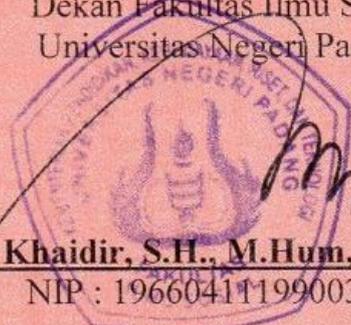
Dinyatakan lulus setelah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi
Departemen Geografi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada hari Kamis, Tanggal Ujian 22 Februari 2024 Pukul 09.40-10.40 WIB
dengan judul

Pola Persebaran dan Pemanfaatan Kawasan oleh Peladang di Hutan Nagari Buluh
Kasok Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung

Padang, Februari 2024

Tim Penguji	Nama	Tanda Tangan
Ketua Tim Penguji	: Dra. Endah Purwaningsih, M.Sc	1. 
Anggota Penguji	: Dr. Paus Iskarni, M.Pd	2. 
Anggota Penguji	: Dr. Arie Yulfa, S.T., M.Sc	3. 

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang


Afriya Khaidir, S.H., M.Hum, MAPA, Ph.D
NIP : 196604111990031002



UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL
DEPARTEMEN GEOGRAFI

Jalan. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang – 25131 Telp 0751 7875159

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fina Hariyanti
NIM/BP : 19136137/2019
Program Studi : Geografi
Departemen : Geografi
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya dengan judul : “POLA PERSEBARAN DAN PEMANFAATAN KAWASAN OLEH PELADANG DI HUTAN NAGARI BULUH KASOK KECAMATAN LUBUK TAROK KABUPATEN SIJUNJUNG” adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat dari karya orang lain maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan syarat hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi Universitas Negeri Padang maupun di masyarakat dan negara.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Diketahui Oleh,
Kepala Departemen Geografi

Padang, Februari 2024
Saya yang menyatakan

Febriandi, S.Pd., M.Si.
NIP. 197102222002121001



Fina Hariyanti
NIM. 19136137

ABSTRAK

Fina Hariyanti. 2024. “Pola Persebaran Dan Pemanfaatan Kawasan Oleh Peladang Di Hutan Nagari Buluh Kasok Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Potensi hutan nagari. 2) Pola persebaran ladang di kawasan hutan nagari. 3) Pemanfaatan kawasan oleh peladang di hutan nagari.

Penelitian ini merupakan penelitian mix method, kombinasi dari metode penelitian kuantitatif dan kualitatif.

Penelitian ini dilakukan di Hutan Nagari Buluh Kasok, Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung. Teknik pengumpulan data meliputi proses pengukuran dan pengambilan data langsung ke lapangan menggunakan GPS (*Global Positioning System*), wawancara dan penyebaran angket.

Penelitian ini menemukan: 1) Potensi Hutan Nagari Buluh Kasok melalui perhitungan skoring berdasarkan indikator keberlimpahan, kemampuan sumber daya manusia, teknologi, modal dan pasar. 2) Hasil pola persebaran ladang dalam kawasan Hutan Nagari Buluh Kasok berdasarkan analisis *Average Nearest Neighbor* pada *Software ArcGIS* adalah pola acak (*random*) dengan *Nearest Neighbor Ratio* 1,136415 dan z-score 1,278495. 3) Pemanfaatan kawasan Hutan Nagari sebanyak 31% dari luas Hutan Nagari \pm 763 ha. Jumlah peladang yang teridentifikasi sebanyak 77 peladang.

Kata kunci: Potensi, Pola Persebaran, Pemanfaatan, Hutan Nagari

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan Rahmat, Hidayah dan Kemudahan yang selalu diberikan kepada Hamba-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pola Persebaran Dan Pemanfaatan Kawasan Oleh Peladang Di Hutan Nagari Buluh Kasok Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung”**. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat sekalian yang telah menyempurnakan akhlak dan menuntun manusia kepada kehidupan yang berilmu pengetahuan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains Studi Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Hal tersebut tidak lepas dari berbagai pihak yang telah membimbing, memberi saran serta arahan yang sangat bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis ucapan terimakasih kepada:

1. Sebagai ungkapan terimakasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada Orang Tua tercinta Ayahanda Marlis dan Ibunda Lenni Mahyuni yang selalu menjadi penyemangat, serta tiada hentinya memberikan kasih sayang dan do'a dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada penulis. Serta cinta kasih keempat adik-adik penulis Riska Ananda, Lailatul Fitri, Akhifa Fahira, dan Muhammad Azzidan.
2. Ibu Dra. Endah Purwaningsih, M.Sc selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan menjadi penerang dalam penulisan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Paus Iskarni, M.Pd selaku penguji I dan Bapak Dr. Arie Yulfa, ST, M.Sc selaku penguji II yang telah memberikan banyak masukan yang bermanfaat dalam perbaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Widya Prarikeslan, S.Si., M.Si selaku Koordinator Prodi Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
5. Seluruh Dosen Prodi Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu dan pengalaman baru kepada penulis.
6. Seluruh Staf Tata Usaha (TU) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah banyak membantu segala urusan administrasi maupun birokrasi.
7. Keluarga Besar Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI Kota Padang selaku instansi yang telah mendukung penulis dalam pengambilan data untuk keberlangsungan penelitian penulis serta saran-saran yang membangun.
8. Sahabat terbaik penulis Putri Andam Dewi, Rosita, Rananda Putri, Hotma Tua, Ardiansyah, Meiza Putri, Islahalvia, Yolanda Putri, Teguh Hidayat, Yolla Ramadhana, Annisa Nolvi Warni, Manisa Rahmi Illahi, Egita Yaseen, Teguh Hidayat dan Krismanto Waruwu. Serta teman-teman saya di Unit Kegiatan Kesenian (UKKES) Universitas Negeri Padang yang sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis.

Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan dari penulisan skripsi ini. Penulis telah berusaha dengan sebaik mungkin dengan kemampuan yang ada dalam menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan

tambahan ilmu bagi penulis dan pembaca, serta dapat dijadikan sebagai pedoman untuk penelitian lebih lanjut.

Padang, 6 November 2023

**Fina Hariyanti
19136137**

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Teori	10
1. Hutan	10
2. Hutan Nagari	14
3. Potensi Hutan Nagari	16
B. Penelitian Relevan	18
C. Kerangka Konseptual	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	26
C. Sumber Data	28
D. Alat dan Bahan	29
E. Tahapan Pengumpulan Data	30
F. Teknik Analisis Data	31
G. Diagram Alir Penelitian	36
BAB IV DESKRIPSI WILAYAH, HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
B. Hasil Penelitian	41

C. Pembahasan	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1. SK Hutan Sosial Per Provinsi	2
Tabel 2. Penelitian Relevan	18
Tabel 3. Sumber Pengolahan Data	29
Tabel 4. Alat dan Kegunaan	29
Tabel 5. Bahan Penelitian	29
Tabel 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	40
Tabel 7. Fasilitas Umum	40
Tabel 8. Bobot dan Keterangan Indikator Keberlimpahan	42
Tabel 9. Bobot dan Keterangan Indikator SDM	42
Tabel 10. Bobot dan Keterangan Indikator Pasar	42
Tabel 11. Bobot dan Keterangan Indikator Teknologi	42
Tabel 12. Bobot dan Keterangan Indikator Modal	43
Tabel 13. Bobot dan Keterangan Indikator Akses Jalan	43
Tabel 14. Bobot dan Keterangan Indikator Keindahan	43
Tabel 15. Potensi Hutan Nagari	43
Tabel 16. Potensi Pariwisata	44
Tabel 17. Rangkaing Hasil Skoring	44
Tabel 81. Titik Koordinat Ladang	48
Tabel 19. Pemanfaatan Kawasan	55
Tabel 20. Nama Ilmiah Komoditi	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual	24
Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian	27
Gambar 3. Diskusi Menentukan Potensi Hutan Nagari	32
Gambar 4. Sketsa nagari	33
Gambar 5. Potensi Nagari & Hutan Nagari	33
Gambar 6. Hasil Skoring	34
Gambar 7. Diagram Alir Penelitian	37
Gambar 8. Peta Penggunaan Lahan	47
Gambar 9. Peta Persebaran Ladang	50
Gambar 10. Continuum Nimali NN Statistic T	53
Gambar 11. Hasil Analisis Tetangga Terdekat	53
Gambar 12. Diagram Pemanfaatan Kawasan	56
Gambar 13. Diagram Penggunaan Lahan Hutan Nagari	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Identifikasi Peladang	68
Lampiran2. Tabel Identifikasi Peladang	70
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian	97
Lampiran 4. Surat Izin Pengambilan Data	98
Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian	99

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat beragam. Setiap daerah memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda sesuai dengan letak geografis dan kondisi biofisik daerah tersebut. Hal ini menyebabkan tata kelola sumberdaya alam membutuhkan manajemen yang kompleks dengan meliputi batasan spasial dan berbagai tingkat administrasi pemerintahan (Nur Ikhsanudin et al., 2018). Sesuai dengan UUD 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya adalah rahmat Tuhan dan dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, merumuskan pengertian hutan adalah “Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan”. Menurut UU No. 41 Tahun 1999, salah satu penyelenggaraan kehutanan bertujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan aneka fungsi hutan meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari. (No.41, 2004).

Presiden RI Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan (SK) Hutan Adat, SK Hutan Sosial, dan SK Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Se-

Indonesia. Pada hari Kamis (07/01/2021), diserahkan 2.929 SK Perhutanan Sosial di seluruh Tanah Air, di seluruh Indonesia, luasnya 3.442.000 hektare. Berikut data penyerahan SK Hutan Sosial per provinsi yang diperoleh dari Kementerian LHK :

Tabel 1. SK Hutan Sosial Per Provinsi

No.	PROVINSI	JUMLAH (SK)
1.	Jawa Barat	41
2.	Jawa Tengah	77
3.	Jawa Timur	277
4.	Banten	28
5.	Aceh	35
6.	Sumatera Utara	113
7.	Sumatera Barat	126
8.	Riau	31
9.	Jambi	64
10.	Sumatera Selatan	58
11.	Bengkulu	44
12.	Lampung	144
13.	Kepulauan Riau	23
14.	Kepulauan Bangka Belitung	95
15.	Kalimantan Barat	134
15.	Kalimantan Selatan	102
17.	Kalimantan Tengah	153
18.	Kalimantan Timur	45
19.	Kalimantan Utara	40
20.	Gorontalo	62
21.	Sulawesi Barat	81
22.	Sulawesi Selatan	277
23.	Sulawesi Tengah	110
24.	Sulawesi Tenggara	132
25.	Sulawesi Utara	49

No.	PROVINSI	JUMLAH (SK)
26.	Bali	79
27.	Nusa Tenggara Barat	91
28.	Nusa Tenggara Timur	158

Sumber : (Sekretariat Kabinet, 2021)

Selain itu juga diserahkan 35 SK Hutan Adat seluas 37.526 hektar di 11 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi, Jawa Tengah, Banten, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Maluku (Sekretariat Kabinet, 2021). Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang menerapkan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) atau lebih dikenal Perhutanan Sosial dalam bentuk Hutan Desa yang dinamakan Hutan Nagari. Nagari merupakan istilah yang menggambarkan masyarakat yang tersusun ke dalam unit kesatuan masyarakat adat di Sumatera Barat. Peran nagari dalam pengelolaan hutan ini salah satunya dikukuhkan dalam Perda No.10 tentang Tanah Ulayat dan Perda No.2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Pelaksanaan pengelolaan Hutan Nagari ditujukan untuk memberikan akses kepada nagari melalui lembaga nagari dalam mengelola sumberdaya hutan secara lestari dengan prinsip partisipatif untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pengembangan PHBM di Sumatera Barat mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/Menhut-II/2006 tentang Hutan Desa dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan, yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kemudian mendeliniasi sejumlah kawasan hutan untuk menerapkan skema-skema Perhutanan Sosial (Asmin, 2021). Sekarang telah diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Pemerintah Republik Indonesia, 2021).

Potensi Sumber Daya Hutan di Kabupaten Sijunjung mencapai $\pm 186.226,64$ ha (SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.35/Menhut-II/2013) atau 59,48 % dari luas wilayah Kabupaten Sijunjung, dengan luas masing-masing fungsi terdiri dari Hutan Suaka Alam/ Kawasan Pelestarian Hutan (KSA/KPH), Pangian I dan Pangian II dengan luas $\pm 40.178,13$ ha berada di Kecamatan Tanjung Gadang, Kamang Baru dan Sijunjung. Hutan Lindung (HL) dengan luas $\pm 78.988,34$ ha berada di Kecamatan Sijunjung, Sumpur Kudus, Tanjung Gadang, Lubuk Tarok, Kamang Baru, Koto VI dan IV Nagari. Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan luas $\pm 29.709,49$ ha yang berada di Kecamatan Kamang Baru, Sijunjung, Sumpur Kudus, Kupitan dan IV Nagari. Hutan Produksi Tetap (HPT) dengan luas $\pm 22.230,32$ ha berada di Kecamatan Sijunjung, IV Nagari, Lubuk Tarok, Kamang Baru, Tanjung Gadang, Kupitan, Koto VII dan Sumpur Kudus. Hutan Produksi (HP) yang dapat dikonversi dengan luas $\pm 15.125,36$ ha berada di Kecamatan Kamang Baru, Tanjung Gadang dan Sijunjung (*Potensi Kehutanan - Kabupaten Sijunjung*, n.d.).

Sehubungan dengan itu Pemerintah menjalin kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KKI WARSI dalam penguatan masyarakat sebagai pemilik hutan adat dengan beberapa skema Perhutanan Sosial. KKI WARSI mendampingi Nagari Buluh Kasok yang berada di Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung sejak tahun 2016 Nagari Buluh Kasok memiliki luas wilayah 4.120 Ha dan terletak pada ketinggian 125-500 m dari permukaan laut. Daerah daratnya mempunyai areal terluas berupa Sawah yaitu \pm 560 Ha Kebun/ Ladang \pm 1.045 Ha dan memiliki Hutan Nagari dengan luas + 763 Ha, dikelola oleh Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN). Pengusulan SK Hutan Nagari Buluh Kasok di mulai pada tahun 2017 dan keluar pada tahun 2018. Hutan nagari merupakan kawasan lindung yang telah diberi izin untuk dikelola oleh nagari. Pada prinsipnya Hutan Nagari sama dengan Hutan Desa. Sumatera Barat sejak tahun 2000 dengan semangat kembali ke nagari, sehingga PHBM di daerah ini juga menyesuaikan sehingga skema yang muncul adalah Hutan Nagari (*Nagari Buluh Kasok*, 2018). Hutan nagari Buluh Kasok mengandung potensi berupa hasil hutan bukan kayu (HHBK), komoditi dan jasa lingkungan. Sebagian besar masyarakat mengelola hutan nagari menjadi ladang. Mengakibatkan terbentuknya pola persebaran ladang di dalam Hutan Nagari.

Tantangan yang dihadapi Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Nagari Buluh Kasok yaitu belum mengetahui pola persebaran ladang di Hutan Nagari sehingga potensi yang dimiliki Hutan Nagari tidak tergali secara maksimal. Akibat dari hal tersebut akan berdampak pada keadaan ekonomi

dan sosial masyarakat. Selain itu, masalah mengenai rendahnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada pada Hutan Nagari. Sehingga sumber daya alam yang ada pada hutan nagari tidak dimanfaatkan secara optimal dan tidak terkelola dengan baik. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam penggunaan kawasan hutan nagari tidak berjalan optimal, terbukti dengan masih banyaknya lahan tidur yang belum direalisasikan oleh masyarakat. Untuk itu dilakukan pemetaan ladang dalam Hutan Nagari dengan tujuan memudahkan pemerintah dalam memberikan bantuan seperti pemberian bibit tanaman bagi peladang guna menunjang perekonomian masyarakat dan menerima manfaat langsung dari Hutan Nagari. Pemetaan Ladang dilakukan menggunakan GPS (Global Positioning System) yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan pemetaan lokasi ladang yang menggambarkan proyeksi permukaan bumi dalam bentuk dua dimensi.

Berdasarkan paparan di atas dibutuhkan suatu upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, menumbuhkan inisiatif, kreativitas dan jiwa kemandirian dalam suatu pelaksanaan kegiatan secara partisipatif. Selain itu dari hasil penelusuran penulis yang membahas pola persebaran dan pemanfaatan kawasan oleh peladang di Hutan Nagari Buluh Kasok jarang ditemukan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pandangan dari sumber data dan informasi yang diambil. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan kajian yang berjudul “POLA PERSEBARAN DAN PEMANFAATAN KAWASAN OLEH PELADANG

DI HUTAN NAGARI BULUH KASOK KECAMATAN LUBUK TAROK
KABUPATEN SIJUNJUNG” menjadi bahan penelitian penulis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana potensi Hutan Nagari Buluh Kasok Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung?
2. Bagaimana pola persebaran ladang di kawasan Hutan Nagari Buluh Kasok Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung?
3. Bagaimana pemanfaatan kawasan oleh peladang di Hutan Nagari Buluh Kasok Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan antara lain:

1. Mengetahui bagaimana potensi di Hutan Nagari Buluh Kasok Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung.
2. Mengetahui bagaimana pola persebaran ladang di kawasan Hutan Nagari Buluh Kasok Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung.
3. Mengetahui bagaimana pemanfaatan kawasan oleh peladang di Hutan Nagari Buluh Kasok Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca untuk dapat mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan tentang pola persebaran dan pemanfaatan kawasan oleh peladang di hutan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah jumlah penelitian di bidang geografi khususnya tentang pola persebaran dan pemanfaatan kawasan oleh peladang di hutan Nagari Buluh Kasok Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah dan memperluas wawasan penulis dalam melakukan penulisan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku perkuliahan, khususnya mengenai geografi berupa potensi sumber daya hutan tentang pola persebaran dan pemanfaatan kawasan oleh peladang di hutan Nagari Buluh Kasok Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang tinggal di Nagari Buluh Kasok Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung untuk memahami tentang pola persebaran dan pemanfaatan kawasan oleh peladang di Hutan Nagari. Diselenggarakan dalam bentuk sosialisasi bersama masyarakat, perangkat wali nagari dan

anggota Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN). Dimana terdapat beberapa keunggulan antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat serta memudahkan masyarakat bertanya apabila ada keraguan mengenai pemanfaatan kawasan.
2. Pembangunan sumber daya alam dan potensi akan lebih efektif dan efisien.
3. Membantu masyarakat dalam menentukan pengembangan komoditi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar Hutan Nagari.